

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PERISTIWA TANJUNG PRIOK TAHUN 1984**

#### **A. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984**

##### **1. Pengerdilan Partai Politik**

Pada awal kekuasaannya, Presiden Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris sah dari konstitusional dari Presiden Soekarno. Dari khazanah ala Soekarno, pemerintah Orde Baru mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara sehingga menjadi resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto.<sup>1</sup>

Istilah “Orde Baru” dimaklumkan sebagai keinginan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas munculnya keadaan baru yang lebih baik dari pada keadaan lama. Reorientasi ekonomi, politik, dan hubungan internasional adalah langkah awal yang ditegakkan oleh Orde Baru. Konsolidasi kekuasaan Orde Baru membutuhkan kepastian stabilitas politik. Bukan hanya komunisme, namun semua hal yang dinilai bertalian erat dengan kekuasaan Soekarno dan memiliki potensi kontra dengan Orde Baru diminimalisasi sedemikian rupa. Hal itu sesuai dengan tugas Kabinet

---

<sup>1</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media) Cet, I hal, 44-46

Pelita I, yaitu pemilihan umum, stabilitas politik, pembersihan aparatur negara, dan setabilitas ekonomi serta pembangunan lima tahun pertama.<sup>2</sup>

Atas dasar setabilitas politik pula, pemerintah Presiden Soeharto melakukan fusi terhadap partai-partai politik pada tahun 1973. Golongan Karya (Golkar) menjadi mesin politik Orde Baru yang hampir bisa dipastikan selalu menang setiap kali penyelenggaraan pemilu. Presiden Soeharto selalu mempunyai argumen bahwa era liberal di tahun 1950-an dengan sistem multi partai tidak membawa Indonesia pada kemakmuran. Upaya tersebut diperkuat oleh pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan UU politik dengan menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal. Namun, dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik, maka muncullah istilah “mayoritas tunggal”, yaitu Golkar dijadikan sebagai partai utama sambil pada saat yang sama pemerintah mengabaikan dua partai lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Orde Baru lalu berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi partisipasi politik. Pada saat yang bersamaan, masyarakat digiring ke pemahaman sebagai bagian utuh dari negara. Setiap individu harus membaktikan hidupnya, mendahulukan kewajiban ketimbang hak. Masyarakat hidup dalam lingkup paham kekeluargaan, tidak ada perbedaan

---

<sup>2</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*. Hal 487-489

antara pemimpin dan yang dipimpin. Tugas pemimpin adalah menafsirkan kehendak rakyatnya, sementara tugas rakyat adalah mengikuti pemimpin.<sup>3</sup>

Singkatnya, negara adalah sesuatu yang integral, dengan batas-batas yang ahirnya malah tidak jelas. Pemerintah Orde Baru kemudian mengenalkan istilah-istilah “negara integralistik” dan “negara kekeluargaan”, “demokrasi pancasila”, “sistem kekeluargaan”, dan “musyawarah untuk mufakat”. Presiden Soeharto selalu mengatakan bahwa keamanan dalam negeri harus terjamin agar penanaman modal asing yang diperlukan tidak terganggu. Akibatnya, tindakan represif dilakukan terhadap pers, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat yang mencoba melakukan keritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Selama 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Dia mengenalkan pembangunan secara bertahap dan melaksanakannya secara konsisten. Cara ini membuahkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Rakyatpun dimanjakan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terkendali dan bahan bakar minyak yang disubsidi. Namun, untuk semua itu ternyata ongkosnya sangat mahal. Demokrasi ditetapkan di bawah pertumbuhan ekonomi. Hak asasi manusia diabaikan atas nama stabilitas keamanan. Korbanpun berjatuhan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela karena memang tidak

---

<sup>3</sup> Hamid Basyaib, dkk. *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Pustaka Alvabet; Jakarta:1999). Hal, 280.

ada upaya mengatasinya. Sementara, kalangan pegawai negeri, termasuk personal militer, dibiarkan hidup dengan gaji kecil.<sup>4</sup>

## **2. Asas Tunggal Pancasila**

Meskipun penggabungan partai-partai pada tahun 1973 merupakan contoh nyata dari ketergantungan pemerintah kepada ideology nasional untuk menciptakan demokrasi Pancasila dan melegitimasi tindakan-tindakannya, tetapi baru pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru melakukan ideologisasi yang dimaksudkan untuk menetapkan lebih lanjut parameter-parameter dan kendali-kendali atas wacana politik di Indonesia. Pada 22 Mater 1978, MPR mengesahkan sebuah ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).<sup>5</sup>

Ketetapan ini menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan pedoman MPR untuk rencana pembangunan lima tahun. Dengan 4P ini, maka dimulailah program indoktrinasi Pancasila secara nasional melalui program-program pendidikan ideologi yang dilaksanakan secara ketat. Untuk kepentingan Orde Baru pula, maka muncul BP7 yang menjadi pelaksana dari rangkaian penataran P4 dengan materi indoktrinasi, yaitu Pancasila, UUD 1945, serta GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Presiden Soeharto menggambarkan UUD 1945 sebagai hal yang sempurna dan tidak bisa

---

<sup>4</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto biografi singkat 1921-2008* . hal, 47-49

<sup>5</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008*. Hal 47-49.

diubah. Pancasila dikatakan tidak lahir pada 1 Juni 1945, tetapi pada 18 Agustus 1945. Untuk menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia telah ada sejak lama, maka Sumpah Palapa Gadjah Mada diberi pengertian dengan menafsirkannya sebagai semacam persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan dasar pengertian itulah, maka Hari Kebangkitan Nasional selalu diperingati dengan biaya besar. Penataran P4 pun sarat dengan istilah-istilah simbolis dari bahasa-bahasa Sansakerta. Istilah “Nusantara” dipopulerkan sebagai padanan nama Indonesia. Nama-nama gedung di DPR/MPR bernama Nusantara, ruangan-ruangannya menggunakan istilah Sansakerta. Bahkan, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikatakan oleh Presiden Soeharto sebagai kehendak yang sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945.

Semua usaha itu dilakukan secara berencana dengan hasil yang tidak mendapat pujian dari lembaga-lembaga internasional, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga-lembaga di lingkungan PBB lainnya. Pada masa pemerintah Presiden Soeharto, kurikulum pendidikan dijadikan sarana indoktrinasi. Banyak materi pelajaran sekolah yang hanya merupakan pola-pola cuci otak, indoktrinasi, dan pembenaran kekuasaan Orde Baru. Bagi Orde Baru, berbagai bentuk perdebatan mengenai ideology negara, terutama antara kelompok Islam versus nasionalis, tidak membuat

stabilitas nasional berjalan dengan baik, tetapi justru struktur politik labil yang lebih mengedepan.<sup>6</sup>

### **3. Pola Patron Klien**

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto sangat menentukan jabatan-jabatan eksekutif seperti gubernur, walikota, bupati, bahkan Gubernur Bank Sentral. Presiden Soeharto juga mengangkat sebagian anggota parlemen yang tidak dipilih melalui pemilu. Untuk menjadi ketua partai politik, seseorang harus melapor dan meminta izin kepada Presiden Soeharto. Bahkan, ketua PMI (Palang Merah Indonesia) pun haruslah orang yang memperoleh restu dari Presiden Soeharto.<sup>7</sup>

Dalam bidang hukum dan kehakiman, Presiden Soeharto mengangkat hakim agung dan ketua Mahkamah Agung sesuai dengan kemauannya sendiri. Presiden Soeharto juga memilih direktur utama BUMN, apalagi yang sangat vital seperti Pertamina. Kebijakan-kebijakan penting dari BUMN harus menunggu persetujuan Presiden Soeharto. Selain itu, kalangan professional dikendalikan oleh pemerintah. Mereka harus berhimpun dalam

---

<sup>6</sup> Suryanegara, *Api Sejarah 2*. Hal, 485-486

<sup>7</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008* hal, 59.

wadah tunggal (wartawan, dokter, buruh, dan pengusaha) dan pengurusnya wajib mendapat restu dari Presiden Soeharto.<sup>8</sup>

Untuk meyelamatkan posisinya, Presiden Soeharto terus memainkan faksi berlainan di dalam berbagai kalangan, termasuk kalangan militer dan ideologis. Misalnya, agar mereka saling bertikai, maka Presiden Soeharto awalnya mendukung kelompok nasionalis, lalu mendukung unsur Islam. Dengan demikian, Presiden Soeharto akan selalu menjadi patron yang dibutuhkan oleh banyak pihak.<sup>9</sup>

#### **4. Represi Terhadap Oposisi**

Kekuasaan Presiden Soeharto selama era Orde Baru sebenarnya bukan berjalan tanpa kritik dan protes. Berbagai aksi protes dan demonstrasi dilakukan di sepanjang sejarah Orde Baru. Beberapa diantaranya bahkan menjadi anarki. Gerakan yang dilakukan kaum mahasiswa di berbagai perguruan tinggi saja telah dilakukan paling tidak dalam tiga periode.<sup>10</sup>

Pada masa Orde Baru, negara hampir tidak bisa dibedakan dari Presiden Soeharto, keluarga, sekutu, serta keroninya. Mereka mengambil alih seluruh hak untuk mendefinisikan “kepentingan nasional”. Akibatnya, kepentingan nasional menjadi identik dengan kepentingan segelintir

---

<sup>8</sup> Richard Robinson, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*(Komunitas Bambu; Jakarta:2012) hal 83-85.

<sup>9</sup> Suryanegara, *Api Sejarah 2*. Hal, 485-486

<sup>10</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008* . hal, 59-63.

penguasa politik dan ekonomi, dan segala unsur dalam masyarakat yang menentanginya dinyatakan sebagai penghianat. Bahkan, oposisi menjadi kata yang kotor. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri sehingga organisasi massa tak lebih dari bentukan Orde Baru. Gerakan perlawanan terhadap represi Orde Baru sebenarnya selau dilakukan oleh sejumlah pihak di Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan muncul di kalangan rakyat maupun intelektual, tidak terkecuali mahasiswa. Bentuk-bentuk oposisi simbolis pada awal tahun 1970-an, misalnya, terlihat dari munculnya gerakan Golongan Putih (Golput) serta aksi-aksi mahasiswa anti korupsi, atau gerakan sepihak kaum tani seperti aksi diam dalam pola tanam atau membakar tanamannya sendiri serta gerakan ratu adil (kebatinan) ataupun gerakan keagamaan yang lain.<sup>11</sup>

Pada tahun 1970-an, Presiden Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Presiden Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Santosa, Holid O, *Perjalanan Sang Jendral Soeharto 1921-2000*. Hal, 111-116.

<sup>12</sup> Harry Aveling, *Rahasia Membutuhkan Kata* (Indonesia Tera; Magelang: 2003) hal, 111-113.

Dalam bidang politik, memang banyak sekali peristiwa dan kondisi yang menunjukkan arogansi pemerintah Orde Baru. Peristiwa Malari (tahun 1974) dan demonstrasi anti Presiden Soeharto (tahun 1978), misalnya, telah memandulkan gerakan oposisi. Para aktivis mahasiswa, tokoh pergerakan, dan akademisi lalu ditahan serta dipenjarakan. Mereka antara lain Hariman Siregar, Sjahrir, Adnan Buyung Nasution, Judilherry, Soekotjo, Rizal Ramli, A.M Fatwa, Arief Rachman, Ibrahim Zakir, Musfihin Dahlan, Umar Marasabessy, Evert Matulesy, Ir. Sanusi, Prof. Ismail Suny, H.R. Dharsono, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Peristiwa Malari memang menjadi tonggak penting perubahan sikap Presiden Soeharto dalam memerintah. Demonstrasi mahasiswa yang menentang modal asing terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka berkunjung ke Jakarta. Para demonstran membakar mobil-mobil buatan Jepang di jalan-jalan. Presiden Soeharto sangat marah dengan peristiwa ini. Baginya, demonstrasi anarkis semacam itu akan menyebabkan larinya modal asing yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia.<sup>14</sup>

Gerakan mahasiswa pada tahun 1978 di sejumlah kampus di Indonesia muncul sebagai bentuk penolakan atas pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai presiden. Peristiwa tersebut mengakibatkan

---

<sup>13</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008*. Hal, 44-46.

<sup>14</sup> Harry Aveling, *Rahasia Membutuhkan Kata*. hal, 111-113.

sejumlah mahasiswa ditangkap dan diadili. Oleh karena itu, untuk mengeleminasi “pemberontakan” mahasiswa, Presiden Soeharto memberlakukan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1978. Ini adalah kebijakan untuk mengunci setiap kemungkinan mahasiswa berpolitik di luar kampus.<sup>15</sup>

Aturan ini ditentang keras berbagai organisasi mahasiswa karena dianggap hanya akan menempatkan mahasiswa sebagai kutu buku yang lebih berkonsentrasi pada studinya dari pada kegiatan-kegiatan di luar kampus. Hubungan dengan kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.<sup>16</sup>

Presiden Soeharto kemudian membungkam pers melalui UU Pokok Pers No. 12/tahun 1982. Undang-undang ini mengisyaratkan restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Dalam konteks represi pula dan atas oposisi pula, maka organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Metode ini secara teoritis sering disebut sebagai korporatisme negara.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiono KS., dkk. *Pengatahuan Sosial Sejarah*. Hal, 108-109.

<sup>16</sup> Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008*. Hal, 44-46

<sup>17</sup> Santosa, Holid O, *Perjalanan Sang Jendral Soeharto 1921-2008*. Hal, 111-116.

Pada kurun waktu tahun 1970-1980, suhu politik Indonesia memang terus menghangat. Diawali dengan protes-protes mahasiswa, sampai peristiwa-peristiwa di sidang umum sekitar dimasukkannya Aliran Kepercayaan dan KNPI dalam GBHN, serta disahkannya P4 sebagai ketetapan MPR. (Kurun masa itu peranan ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan rakyat dipandang semakin surut. Banyak kalangan menilai peranan ABRI ini hanya diprioritaskan pada golongan tertentu saja. Sehingga tuntutan terhadap peranan ABRI sebagai pelindung, dan kemanunggalannya dengan rakyat, menjadi sentral gerakan mahasiswa).<sup>18</sup>

Kritik-kritik tajam pun mengemuka sebagai respon atas kebijakan-kebijakan represif oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal keritis. Mereka tergabung dalam kelompok yang disebut Petisi 50. Mereka mengeluarkan serial pernyataan yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar. Petisi 50 juga menuntut adanya reformasi politik. Pemerintah menjawab tuntutan mereka dengan mencekal para anggota Petisi 50. Mereka bahkan tidak pernah

---

<sup>18</sup> Holid O Santosa, *Perjalanan Sang Jendral Besar Soeharto 1921-2008*. Hal, 111-116.

diundang dalam acara resmi kenegaraan di Istana Presiden. Bisnis mereka juga dihambat. Mereka benar-benar dikucilkan di masyarakat.<sup>19</sup>

## **B. Kronologi Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984**

Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 merupakan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa Orde Baru yang begitu banyak memakan korban, yang pada awalnya bermula dari ceramah-ceramah yang dilakukan di Masjid-masjid disekitar daerah Tanjung Priok, khususnya Musholah As-Sa'adah yang membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru, seperti kebijakan menjadikan asas tunggal Pancasila, sebagai asas tunggal ideology bangsa Indonesia. Penekanan terhadap umat Islam, seperti dilarang melakukan ceramah tanpa izin, dilarang memakai kerudung bagi anak SMA, dan diwajibkan poto setengah badan yang memperlihatkan kedua anggota telinganya. Serta penekanan-penekanan terhadap organisasi-organisasi atau partai-partai politik Islam, yang dilarang untuk mengikuti pemilu, serta di non aktifkan kegiatannya.

Sebelumnya, pada tanggal 7 September tahun 1984, seorang Babinsa datang ke Musholah As-Sa'adah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum

---

<sup>19</sup> Harry Aveling, *Rahasia Membutuhkan Kata* . hal 111-112.

Muslimin, dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Tidak heran jika kemudian orang-orang yang hadir disitu menjadi marah melihat tingkah laku Babinsa itu. Keesokan harinya tanggal 8 September tahun 1984, Seorang oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) beragama Katholik, Sersan Satu Hermanu, mendatangi Musholah As-Sa'adah untuk menyita pamflet berbau 'Syara'. Namun tindakan Sersan Hermanu sangat menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam Masjid tanpa melepas sepatu, menyiram dinding mushola dengan air got, bahkan menginjak Al-Qur'an. Warga marah dan motor Hermanu dibakar. (Kesaksian Abdul Qadir Djaelani)<sup>20</sup>

Pada tanggal 10 September tahun 1984, Beberapa anggota jamaah Musholah As- Sa'adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori Musholah mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang akhirnya dileraikan oleh dua orang dari jamaah Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaeman, dua orang Takmir Masjid "Baitul Makmur" yang berdampingan dengan Musholah As-Sa'adah, berusaha menenangkan suasana dan mengajak kedua tentara itu masuk ke sekretariat Takmir Masjid guna membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka berbicara di dalam kantor, massa di luar telah

---

<sup>20</sup> Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

berkumpul. kedua pengurus takmir Masjid ini menyarankan kepada kedua perajurit tadi supaya persoalannya disudahi dan dianggap selesai saja, tetapi mereka menolak saran tersebut. Para jama'ah yang berada di luar mulai kehilangan kesabaran, lalu tiba-tiba saja salah seorang dari kerumunan massa menarik sepeda motor salah seorang perajurit yang ternyata seorang marinir, kemudian dibakar. Maka pada hari itu juga, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaeman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, pimpinan Musholah As-Sa'adah dan seorang lain lagi yang ketika itu berada di tempat kejadian. Selanjutnya, Muhammad Nur, salah seorang yang ikut membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan keempat orang tersebut kemarahan massa menjadi kian tak terbendung, yang kemudian memunculkan tuntutan agar membebaskan mereka yang ditangkap itu.<sup>21</sup>

Pada hari berikutnya, para tetangga Mushola yang masih menyimpan kemarahan datang kepada salah seorang tokoh di daerah itu, bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa perwira di Jakarta. Amir Biki menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan empat orang jamaah yang ditahan oleh Kodim, yang diyakininya tidak bersalah. Peran Amir Biki ini tidak perlu mengherankan,

---

<sup>21</sup> Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

karena sebagai salah seorang pimpinan Posko 66, dialah orang yang dipercaya semua pihak yang bersangkutan untuk menjadi penengah jika ada masalah antara penguasa (Militer) dan masyarakat. Usaha Amir Biki untuk meminta keadilan ternyata sia-sia.<sup>22</sup>

Pada tanggal 12 September tahun 1984, beberapa orang mubaligh menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, diantaranya adalah kasus yang baru saja terjadi. Di hadapan massa, Amir Biki berbicara dengan keras yang isinya menyampaikan ultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat PKL 23.00 WIB malam itu. Jika tidak mereka akan mengerahkan massa mengadakan demonstrasi. Di saat ceramah telah usai, berkumpullah sekitar 1500 orang demonstran bergerak menuju Kantor Polsek Dan Koramil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, mereka telah dikepung dari dua arah oleh pasukan bersenjata. Massa demonstran berhadapan dengan tentara yang sudah siaga tempur. Pada saat sebagian pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Lalu terdengar suara tembakan, kemudian diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya kepada

---

<sup>22</sup> Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

kerumunan massa demonstran. Dari segenap penjuru terdengar suara letusan senjata, tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah.<sup>23</sup>

Di saat sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri, pada saat yang sama mereka ditembak lagi dengan menggunakan bazoka, sehingga dalam beberapa detik saja jalanan dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan bersimbah darah. Sedangkan beberapa korban luka yang tidak begitu parah berusaha lari dan berlindung ke tempat-tempat di sekitarnya. Saat tentara-tentara mengusung korban yang telah mati dan luka-luka ke dalam truk-truk militer, tembakan terus berlangsung tanpa henti. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Militer di tengah kota Jakarta. Sedangkan Rumah Sakit lain diultimatum untuk tidak menerima pasien korban penembakan Tanjung Priok. Setelah seluruh korban diangkut, datanglah mobil-mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalan dari genangan darah korban. Satu jam setelah pembantaian besar-besaran ini terjadi, Pangab Jenderal Benny Murdani datang menginspeksi tempat kejadian, dan untuk selanjutnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai sumber, daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Santosa, Holid O, *Perjalanan Sang Jendral Soeharto 1921-2000*. Hal 168-174.

<sup>24</sup> Santosa, Holid O, *Perjalanan Sang Jendral Soeharto 1921-2000*. Hal 168-174.

### **C. Peranan Ulama Terhadap Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984**

Tanjung Priok merupakan tempat dimana para ulama menyampaikan aspirasi dan pendapatnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui media dakwah atau ceramah agama yang disampaikan di Mushola-mushola dan Masjid-masjid yang ada disekitar Tanjung Priok salah satunya ialah di Mushola As-Sa'adah tempat kejadian peristiwa Tanjung Priok Jakarta tahun 1984. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah diantaranya yaitu berupa larangan melakukan ceramah tanpa izin, kebijakan ini berlaku disemua wilayah Indonesia namun tidak dengan wilayah Tanjung Priok. Sebelum terjadinya peristiwa Tanjung Priok ceramah-ceramah agama yang dilakukan di Tanjung Priok seakan-akan dibiarkan dan diberi kebebasan tidak seperti di daerah-daerah yang lain oleh karena itu banyak ulama dan tokoh-tokoh agama yang datang ke Tanjung Priok untuk sekedar menyampaikan ceramah atau bertukar pikiran dengan para ulama-ulama yang ada di Tanjung Priok sampai pada akhirnya terjadilah peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang dilatar belakangi oleh penyiraman tembok Mushola As-Sa'adah dengan air comberan oleh oleh seorang babinsa

yang bernama Sersan Satu Hermanu yang menyulut kemarahan warga Tanjung Priok.<sup>25</sup>

Adapun peran serta ulama, tokoh-tokoh agama, para aktifis, dan cendikiawan-cendikiawan muslim pada masa itu berupa dibentuknya sebuah petisi 50 atau lembaran-lembaran putih yang berisikan catatan-catatan kesalahan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru adapun anggota-anggota dari petisi 50 itu antara lain A.M. Fatwa, Amir biki dan lain-lain. Amir biki gugur dalam peristiwa Tanjung Priok sedangkan anggota petisi 50 yang lainnya dipenjarakan berbarengan dengan korban-korban dari peristiwa Tanjung Priok.<sup>26</sup>

Ditengah kerasnya himpitan dan tekanan dari pemerintah terhadap para ulama dan tokoh-tokoh agama mereka tetap berusaha mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai keislaman pada warga masyarakat Tanjung Priok khususnya dan bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya. Para ulama, tokoh-tokoh agama, dan para aktifis berusaha keras menentang adanya kebijakan diterapkannya Asas Tunggal Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi, politik, dan bernegara serta dijalankannya program

---

<sup>25</sup> <sup>25</sup> Penjelasan dari hasil wawancara dengan Bpk. Yusrin sebagai salah seorang pelaku sejarah juga sebagai salah satu korban penembakan “Peristiwa Tanjung Priok Jakarta Tahun 1984”.

<sup>26</sup> Penjelasan dari hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Sahi sebagai salah seorang pelaku sejarah “Persitiwa Tanjung Priok 1984”. Lokasi Kp. Koja, Gang 4 Koja, Kelurahan Koja, RT 01/RW 05, Jln Pelabuhan.

pengkristenisasian yang dilakukan oleh Jendral Ali Moertopo dan Moerdani yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia serta adanya politik etnis Cina yang diterapkan pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah warga etnis Cina dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia maka tidak heran jika banyak warga etnis Cina yang sukses di Indonesia dan memiliki banyak kekayaan dibandingkan dengan warga peribumi itu sendiri. Pada era tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an warga etnis Cina tetap memegang peranan penting dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Sedangkan warga Tanjung Priok seakan dikekang dan dipersulit dalam menjalankan usaha dan mendirikan perusahaan sedangkan warga non Islam seperti Cina diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam melakukan usaha dan mendirikan perusahaan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peranan ulama, tokoh-tokoh agama, dan para aktifis seperti; Amir Biki, Sayarifudin Rambe, Sofan Sofyan, Ahmad Sahi, Yusron, dan teman-teman memang tidak begitu kontras dan jelas terlihat namun mereka memiliki peranan yang penting dalam menyemarakkan nilai-nilai

---

<sup>27</sup> Penjelasan dari hasil wawancara dengan Bpk. Yusrin sebagai salah seorang pelaku sejarah juga sebagai salah satu korban penembakan “Peristiwa Tanjung Priok Jakarta Tahun 1984”.

keislaman kepada warga Tanjung Priok serta menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyudutkan umat Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Penjelasan dari hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Sahi sebagai salah seorang pelaku sejarah "Persitiwa Tanjung Priok 1984". Lokasi Kp. Koja, Gang 4 Koja, Kelurahan Koja, RT 01/RW 05, Jln Pelabuhan.